

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian Indikator Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) merupakan salah satu indikator untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek dan huruf dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai *purcashing power parity index*.

Tujuan akhir pembangunan adalah kesejahteraan rakyat. Manusia bukan hanya merupakan obyek pembangunan tetapi diharapkan dapat menjadi subyek, sehingga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan suatu wilayah yang secara makro menjadi kemajuan suatu Negara (Basuki, 2014).

Upaya paling ambisius dan terbaru dalam menganalisis perbandingan status pembangunan sosial ekonomi baik dari NSB maupun Negara maju telah dilakukan oleh UNDP (*United Nations Development Program*) secara sistematis dan komprehensif. Amarta Sen, guru besar ekonomi dan filsafat dari Universitas Harvard, menegaskan bahwa pembangunan ekonomi seharusnya diterjemahkan sebagai suatu proses ekspansi dan kebebasan positif yang dinikmati oleh masyarakat.

Ekonom kelahiran Bangladesh ini mendapatkan hadiah nobel dalam ilmu ekonomitahun 1998 atas kontribusinya dalam ekonomika kesejahteraan (*welfare economics* dan teori pilihan social (*social choice theor*) dan juga perhatiannya dalam meneliti masyarakat miskin. dikenal luas terutama meneliti penyebab rawan pangan dan solusi praktisnya dalam mengatasi kelaparan. Sen membantu PBB dalam menyusun *United Nations Human Development Index* atau yang sekarang kita kenal sebagai *Human Development Index (HDI)*. Sen mengamati masalah rill di NSB adalah menurunnya kualitas kehidupan dari pada rendahnya pendapatan.

Sen menginterpretasikan pembangunan sebagai proses memperluas dari “*entitlement*” adalah sejumlah komoditi yang dapat diperoleh seseorang dalam masyarakat dengan menggunakan seluruh hak dan peluang yang dia miliki. “Kapabilitas” diartikan sebagai mencakup apa yang dapat maupun tidak dapat dilakukan misalkan bebas dari kelaparan dari kekurangan gizi, partisipasi dalam masyarakat, bebas bepergian menengok teman, memperoleh tempat tinggal yang memadai dan sebagainya.

UNDP menerbitkan seri tahunan dalam publikasi berjudul *Human Development Report*. Yang menarik dan berharga dari laporan ini yang diterbitkan sejak tahun 1990 adalah penyusunan dan perbaikan HDI, HDI mencoba menyusun peringkat semua Negara dalam skala 0 (Sebagai tingkatan pembangunan manusia yang terendah) hingga 1 (pembangunan manusia yang tertinggi) berdasarkan atas 3 tujuan atau produk pembangunan yaitu : (1) usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup

Diberitakan kepada kami Mua'lla ibn Asad, diberitakan kepada kami Wuhaib, dari Hisyam, dari ayahnya, dari az-Zubair ibn al-Awwam r.a, dari Nabi Saw. Bersabda “Sungguh alangkah baik jika salah seorang diantara kalian (umatku) yang mencari seikat kayu bakar dan mengikatnya kemudian memikulnya dan menjualnya dengan membuka wajah (tanpa rasa malu) karena Allah, daripada meminta-minta kepada orang lain baik diberi maupun tidak. (HR. Al-Bukhari)”.

Hadist diatas menekankan pentingnya berusaha, lalu apa hubungannya dalam pembangunan manusia itu sendiri dalam pembangunan ekonomi bertumpu pada pembangunan manusia.

Apalagi banyak hadits yang menjelaskan bahwa Rasulullah Saw. sendiri sering berdoa agar terlindung dari sifat malas dan kemiskinan. Malas, miskin, dan kebodohan akan menjerumuskan manusia pada kehinaan. Bagaimana mungkin suatu peradaban dibangun atas kekurangan-kekurangan tersebut?

Usaha apapun yang dilakukan seseorang dalam mata pencahariannya, selama bukan merupakan hal-hal yang dilarang oleh syari'at pada dasarnya adalah boleh. mencari seikat kayu bakar dan mengikatnya kemudian memikulnya dan menjualnya, seperti yang dicontohkan Rasul pada hadits di atas menjelaskan bahwa dalam hadist tersebut menjelaskan terhormat dan lebih baik dibandingkan meminta-meminta.

TABEL 1.1

Peringkat Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2014-2018

Provinsi	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
SULAWESI UTARA	69.96	70.39	71.05	71.66	72.20
SULAWESI TENGAH	66.43	66.76	67.47	68.11	68.88
SULAWESI SELATAN	68.49	69.15	69.76	70.34	70.90
SULAWESI TENGGARA	68.07	68.75	69.31	69.86	70.61
GORONTALO	65.17	65.86	66.29	67.01	67.71
SULAWESI BARAT	62.24	62.96	63.60	64.30	65.10
NASIONAL	68.90	69.55	70.18	70.81	71.39

Sumber: Publikasi BPS, ipm.bps.go.id

Tabel 1.1 Dari tabel di atas, tahun 2018 Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki IPM 70.61 % tertinggi ketiga setelah Sulawesi Selatan 70.90% dan Sulawesi Utara 72.20% , menduduki posisi ke empat jika disandingkan IPM Nasional 71.39%.

Namun untuk keseluruhan IPM tiap provinsi di Pulau Sulawesi terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, maka semakin tinggi mutu sumber daya manusia yang akan diperoleh.

TABEL 1.2

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi
Periode 2014-2018

Provinsi	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017	2018
SULAWESI UTARA	69.96	70.39	71.05	71.66	72.20
SULAWESI SELATAN	68.49	69.15	69.76	70.34	70.90
SULAWESI TENGGARA	68.07	68.75	69.31	69.86	70.61
NASIONAL	68.90	69.55	70.18	70.81	71.39

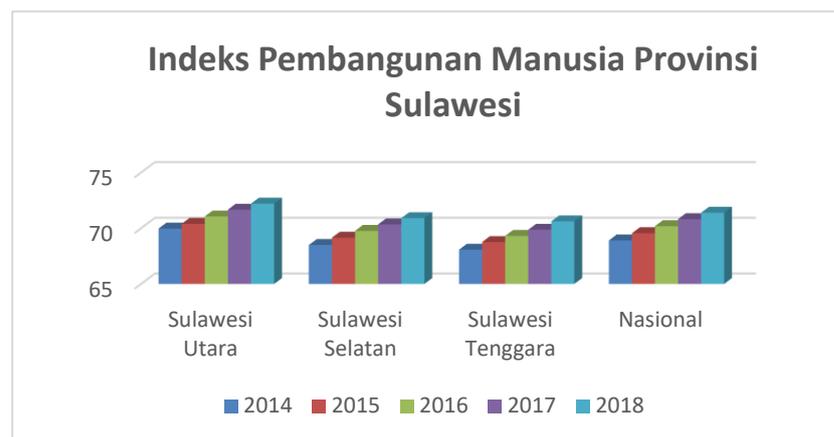
Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik

Menurut publikasi Badan Pusat Statistik pada tahun 2014 hingga 2018 menunjukkan tingkat indeks pembangunan manusia provinsi Sulawesi Tenggara berada pada posisi ketiga dari 6 provinsi yang berada di pulau Sulawesi. Dimana posisi pertama di duduki oleh provinsi Sulawesi Utara. Pada penelitian akan membahas kondisi pembangunan manusia khususnya di provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014-2018.

Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi, secara geografis terletak dibagian selatan garis khatulistiwa di antara 02°45'-06°15 Lintang Selatan dan 120°45 - 124°30 Bujur Timur serta mempunyai

daratan seluas 38.140 km² (3.814.000 ha) dan perairan laut seluas 110.000 km² (11.000.000 ha) kepadatan rata-rata jumlah penduduk 2.704.737.

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki 1 ibu kota yaitu Kendari serta 17 kabupaten yaitu Buton, Muna, Konawe, Kolaka, Konawe Selatan, Bombana, Wakatobi, Kolaka Utara, Buton Utara, Konawe Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Muna Barat, Buton Tengah, Buton Selatan, Kendari, Bau-bau. Dari data tersebut dapat di lihat dalam bentuk perbandingan grafik berikut:



Sumber: publikasi BPS, ipm.bps.go.id

GAMBAR 1.1

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi

Pada gambar 1.1 Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai jumlah kabupaten/daerah yang lumayan banyak dilihat dari kepadatan penduduknya, tetapi hanya beberapa kota saja yang memiliki wilayah yang luas di imbangi dengan jumlah penduduk yang padat.

Walaupun Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan ipm dalam setiap tahunnya namun kehidupan sehari-hari masyarakat masih ada yang kurang

sejahtera hal ini ditimbul karena kurangnya sarana dan prasarana, kesehatan, pendidikan dan penunjang kesejahteraan pembangunan yang kurang merata ataupun peran Pemerintah belum sampai pada masyarakat.

Berikut adalah ulasan mengenai indeks pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara:

TABEL 1.3
Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2014-2018

KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017	2018
Buton	62.31	62.78	63.69	64.47	65.08
Muna	65.09	65.99	66.96	67.61	68.47
Konawe/Kab Kendari	68.68	69.56	69.84	70.24	70.72
Kolaka	70.20	70.47	71.12	71.46	72.07
Konawe Selatan	65.60	66.32	66.97	67.23	67.51
Bombana	63.38	63.65	64.02	64.49	65.04
Wakatobi	66.95	67.22	67.50	67.99	68.52
Kolaka Utara	65.76	66.90	67.60	67.77	68.44
Buton Utara	64.65	65.23	65.95	66.40	67.13
Konawe Utara	66.03	66.44	67.20	67.71	68.50
Kolaka Timur	62.13	62.74	63.60	64.55	65.53
Konawe Kepulauan	61.31	61.72	62.56	63.44	64.36
Muna Barat	61.92	62.29	62.57	63.43	64.11
Buton Tengah	61.92	62.13	62.56	62.82	63.46
Buton Selatan	61.51	62.00	62.55	63.20	63.47
Kota Kendari	81.30	81.43	81.66	81.83	82.22
Kota Bau-Bau	73.13	73.59	73.99	74.14	74.67

Sumber : Publikasi BPS, ipm.bps.go.id

Dari data indeks pembangunan manusia diatas dapat dilihat bahwa pembangunan kualitas hidup masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara meningkat dari tahun ke tahun secara keseluruhan dikabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tenggara.

Rata-rata peningkatan IPM paling tinggi adalah kabupaten Kolaka timur dengan rata-rata kenaikan sebesar 3,4% dari tahun 2014 hingga 2018. Disusul oleh kabupaten Muna sebesar 3,38% dari tahun 2014-2018. Kemudian pada urutan ke tiga kabupaten Konawe kepulauan mengalami peningkatan 3,05%

pada tahun 2014 hingga 2018. Yang kemudian disusul urutan ke empat kabupaten Buton dengan peningkatan IPM sebesar 2,77%.

Kemudian urutan kelima kabupaten Kolaka utara 2,68% dari tahun 2014-2018. Posisi ke enam urutan rata-rata IPM kabupaten Buton utara 2,48%. Kemudian kabupaten Konawe Utara 2,47% yang selisih peningkatan 1% dengan kabupaten Buton utara. Kemudian kabupaten Muna Barat mengalami kenaikan rata-rata IPM 2,19% pada tahun 2014 hingga 2018. Yang disusul oleh peningkatan rata-rata IPM kabupaten Kota Konawe 2,04%. Kemudian peningkatan rata-rata IPM kabupaten Buton selatan 1,96% pada tahun 2014 hingga 2018. Disusul kabupaten Konawe selatan 1,91% yang selisih kenaikan rata-rata IPM 5% dengan kabupaten Buton selatan. Kemudian rata-rata IPM kabupaten Kolaka mengalami peningkatan 1,87% pada tahun 2014 hingga 2018. Yang disusul urutan berikutnya kabupaten Bombana 1,66% kemudian selisih 9% yaitu kabupaten Wakatobi dengan rata-rata peningkatan IPM 1,57%.

Kemudian 2 kabupaten Buton tengah dan Kota Bau-bau mengalami rata-rata peningkatan IPM yang sama yaitu sebesar 1,54% dan urutan terakhir kota Kendari mengalami peningkatan rata-rata IPM sebesar 0,92% ditahun 2014 hingga 2018.

Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu alat untuk mengukur kesejahteraan masyarakat yang diukur dari pertumbuhan ekonomi yang meratanya distribusi pendapatan. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi mengakibatkan naiknya produktifitas perekonomian sehingga

tingkat pendapatan per kapita merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi.

Pendapatan per kapita yang rendah akan mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi sekolah tingkat perguruan tinggi karena semakin tinggi pendidikan akan menghabiskan banyak biaya dan pada bidang kesehatan lebih berarti pada penduduk miskin dikarenakan asset penduduk miskin adalah tenaga kasar.

Peningkatan belanja pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup penduduk miskin.

TABEL 1.4
Data Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2014-2018

KABUPATEN/KOTA	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Buton	14.31	13.75	13.22	13.46	13.67
Muna	14.46	15.45	15.22	14.85	13.19
Konawe/Kab Kendari	15.47	16.09	16.09	15.65	13.48
Kolaka	14.99	14.68	15.05	13.78	12.51
Konawe Selatan	11.60	11.58	11.36	11.14	10.95
Bombana	13.20	12.55	13.06	12.36	11.05
Wakatobi	16.27	16.88	16.46	16.19	14.85
Kolaka Utara	16.10	16.53	17.11	16.24	14.30
Buton Utara	16.35	15.86	15.78	15.58	14.93
Konawe Utara	10.15	9.97	9.75	13.93	14.22
Kota Kendari	5.56	5.59	5.51	5.01	4.69
Kota Bau-Bau	9.25	9.24	8.81	8.39	7.57

Sumber : Publikasi BPS, bps.go.id

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa Jumlah Penduduk Miskin dari daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami penurunan dari tahun 2014-2018 yang diharapkan menurunnya tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara mampu mensejahterakan pembangunan manusia di daerah tersebut.

Paradigma pembangunan yang saat ini sedang berkembang adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat diukur dengan pembangunan manusia dan dapat dilihat dengan kualitas hidup manusia disetiap negara. Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya sangat membutuhkan modal manusia yang berkualitas agar dapat menjadi modal dasar pembangunan. Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas pemerintah dapat bisa memberikan fasilitas untuk meningkatkan kualitas SDM nya. Adapun kualitas SDM dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia dan dapat dipenuhi dengan berbagai kebijakan.(Dewi dkk, 2017)

Salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan IPM adalah kurang meratanya distribusi pendapatan. Masyarakat masih mempercayai bahwa pendapatan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, yang artinya seseorang harus melakukan suatu pekerjaan untuk mendapatkan pendapatan. Fenomena yang terjadi bukan lah masyarakat enggan untuk bekerja hanya saja sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan yang menyebabkan masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga akan berdampak terhadap pengangguran yang semakin tinggi (Meydiasari & Soejoto, 2017) Adapun beberapa faktor yang diduga mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia antara lain.

Meningkatnya PDRB akan mengganti pola konsumsi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Daya beli masyarakat untuk mengkonsumsi (Keuangan et al. 2017) (OJK 2016) suatu barang yang berkaitan erat dengan IPM karena adanya daya beli yang termasuk dalam salah satu indikator

terhadap IPM yaitu indikator pendapatan. Dengan tingginya produktivitas dan kreativitas maka penduduk dapat mengelola sumber daya yang terpenting dalam pertumbuhan ekonomi (Bhakti 2012). Semakin tinggi PDRB maka akan semakin Makmur kesejahteraannya.

Investasi dan dalam memenuhi pelayanan publik pada bidang pendidikan pemerintah daerah sudah mengalokasikan belanja bidang pendidikan, belanja pendidikan atau dana pendidikan digunakan untuk gaji pendidik dan biaya pendidikan namun, terlepas dari itu alokasi dana pendidikan masih belum terealisasi dengan baik. (Nurjanah, 2014)

Hal ini di sebabkan perbedaan provinsi dalam penetapan dana pendidikan belum seimbang. Hal ini mengakibatkan presentase tingkat kemiskinan naik, tingkat kemiskinan akan berdampak pada pendapatan perkapita masyarakat di suatu daerah menurun.

Hubungan antara pendidikan dengan pembangunan manusia memang sudah banyak terjadi, baik dilihat dari segi kuantitas maupun kualitas. Dengan melakukan cara untuk mengangkat kehormatan bangsa dan meningkatkan kemakmuran rakyat yaitu dengan cara melalui pengembangan pendidikan. Seringkali dipercayai bahwa dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan berkaitan positif dengan tingkat penghasilan. Sama dengan kesehatan, Pendidikan menjadi salah satu aspek penting untuk mempercepat pembangunan manusia. Dengan berbagai upaya dilakukan untuk mencegah tingginya angka anak putus sekolah yang disebabkan oleh faktor ekonomi,

memperbaiki kualitas dalam pembelajaran, mengembangkan infrastruktur dan sarana sekolah. Perbaikan tidak hanya dengan kuantitas, tetapi juga dengan memperbaiki kualitas dan layanan pendidikan (Rubiyah, 2012)

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Basuki, 2014) variabel Jumlah Penduduk Miskin memiliki pengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang berarti kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan diartikan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Turunnya produktivitas mengakibatkan bertambahnya jumlah kemiskinan yang akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia.

Dari uraian-uraian yang sudah dijelaskan penulis bermaksud ingin mengkaji lebih dalam tentang indeks pembangunan manusia di provinsi Sulawesi Tenggara dengan penelitian yang berjudul: “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2014-2018 (Studi Kasus 10 Kabupaten dan 2 Kota)”.

B. Batasan Masalah

Mengingat adanya faktor keterbatasan dan banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia, maka dirumuskan masalah yang diteliti hanya membahas pada :

1. Variabel yang digunakan Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Angka Partisipasi Sekolah dan Kemiskinan.
2. Penelitian ini mengambil rentang tahun 2014-2018.
3. Lokasi penelitian ini yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri 10 Kabupaten dan 2 Kota yang meliputi Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, Kota Kendari, dan Kota Bau-bau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang uraian-uraian yang telah disampaikan maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara?
2. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk Sulawesi Tenggara terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara?
3. Bagaimana pengaruh Angka Partisipasi Sekolah (16-18 Tahun) terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara?
4. Bagaimana pengaruh Kemiskinan Sulawesi Tenggara terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara?

D. Tujuan Penelitian

Ada pun Tujuan Penelitian:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk Sulawesi Tenggara terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh Angka Partisipasi Sekolah (16-18 Tahun) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014-2018.
4. Untuk melihat pengaruh Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014-2018.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak yaitu:

1. Bagi penulis yaitu agar dapat menambah ilmu serta wawasan tentang hal yang diteliti di daerah nya sendiri sehingga mampu menggunakan teori yang diterima selama perkuliahan dan realita di lapangan.
2. Bagi institusi pendidikan yaitu dapat digunakan referensi bagi mahasiswa maupun pelajar yang akan melakukan penelitian tentang Indeks Pembangunan Manusia.
3. Bagi masyarakat yaitu agar dapat memberikan informasi tentang masalah pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara.

4. Bagi instansi pemerintah yaitu agar digunakan dalam pengambilan kebijakan untuk kesejahteraan penduduk dan pembangunan manusia khususnya Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Bagi dunia ilmu pengetahuan penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau studi banding bagi mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian yang sejenis.